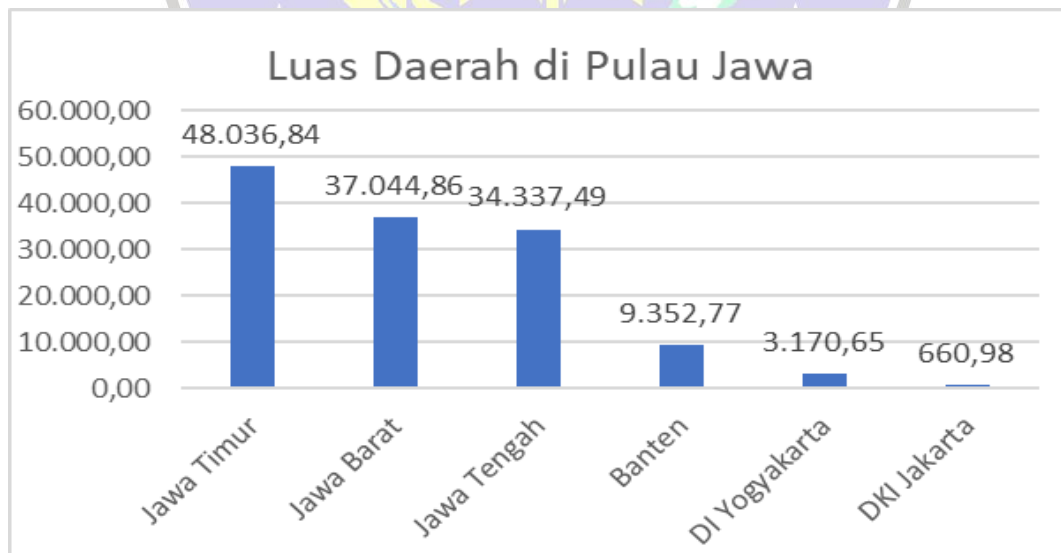


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau paling luas di Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Besar. Dari segi geografi, pulau ini dibatasi oleh Laut Jawa di bagian utara, Samudera Hindia di selatan, Selat Sunda di barat, serta Selat Bali di bagian timur. Luas pulau Jawa sekitar 132.598 km² dan menjadi pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, dengan lebih dari 150 juta orang, atau sekitar lebih dari separuh jumlah total penduduk Indonesia, meskipun luasnya hanya kurang dari 7% dari keseluruhan area negara. Jakarta, yang merupakan ibukota Republik Indonesia, juga terletak di Pulau Jawa. Secara administratif, wilayah ini dibagi menjadi enam provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Gambar 1 Diagram Luas daerah di Pulau Jawa Tahun 2024

Pada gambar 1 diketahui Provinsi Jawa Timur adalah provinsi urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Jawa Timur diperkirakan mencapai sekitar 41,8 juta orang, yang jauh melebihi banyak provinsi lainnya di Indonesia. Di samping itu, Jawa Timur juga mencakup daerah terluas di Pulau Jawa dengan total luas sekitar 48.000 km², yang lebih besar dibandingkan Jawa Barat (± 35.300 km²), Jawa Tengah (± 32.800 km²), DI Yogyakarta (± 3.100 km²), Banten (± 9.600 km²), dan DKI Jakarta yang hanya sebesar 660 km². Penduduk yang besar dan wilayah yang luas tersebut menghasilkan variasi kondisi sosial, ekonomi, dan tenaga kerja yang sangat tinggi, mencakup area metropolitan, zona industri, kawasan pertanian, dan daerah kepulauan, sehingga Jawa Timur menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji dalam konteks Pembangunan dan Pembangunan manusia karena dinamika serta ketimpangan antarwilayah mencerminkan tantangan dan capaian Pembangunan yang beragam.

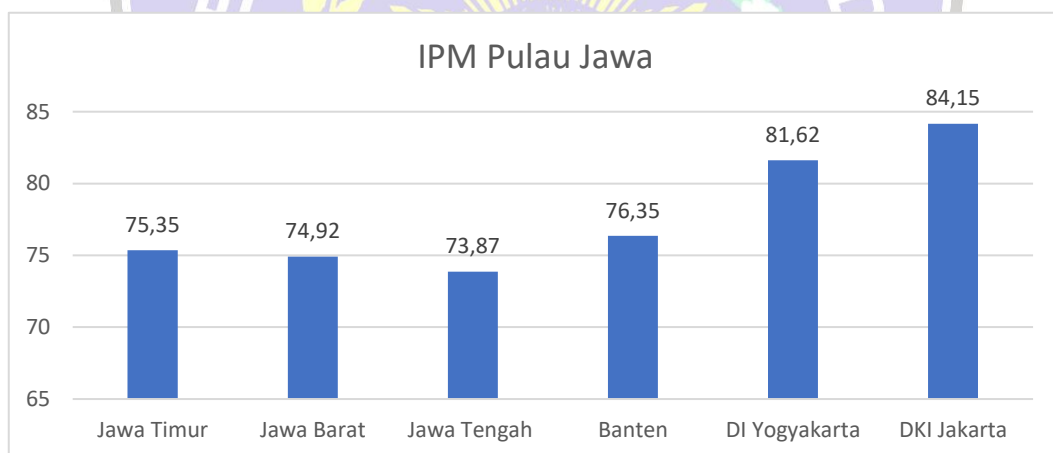
Pembangunan pada awalnya dipahami sebagai upaya aspek ekonomi. Seperti, pertumbuhan pendapatan, dan akumulasi modal, namun pengalaman empiris menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak selalu diikuti oleh perbaikan kualitas hidup Masyarakat, karena masih ditemukan masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa Pembangunan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, sehingga berkembang konsep Pembangunan manusia yang memandang manusia sebagai tujuan utama Pembangunan dengan menekankan peningkatan kualitas hidup melalui perluasan akses terhadap Kesehatan, Pendidikan, dan standar hidup yang layak (Efendi, 2024).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator pembandingan dari Kesehatan, Pendidikan dan Standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kemampuan penduduk dalam memperoleh manfaat Pembangunan, termasuk taraf hidup, layanan Kesehatan, dan Pendidikan yang layak Efendi (2024). Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2025) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan upaya pembangunan manusia di suatu wilayah UNDP. Nilai IPM pada tahun tertentu mencerminkan hasil dari proses pembangunan yang telah berlangsung beberapa tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tingkat IPM menunjukkan seberapa besar kemajuan yang sudah dicapai dan menjadi cerminan dari upaya pembangunan di masa lalu.

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990, IPM telah menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh UNDP, sebanyak 187 negara di dunia telah memiliki data capaian IPM beserta komponen pembentuknya. Secara global, negara-negara kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan nilai IPM-nya, yaitu negara dengan IPM sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. IPM mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Ketiga dimensi ini diukur melalui indikator angka harapan hidup, tingkat pendidikan (seperti lama dan harapan sekolah), serta pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

IPM merupakan ukuran ringkas (*summary measure*), bukan ukuran yang sepenuhnya menggambarkan seluruh aspek pembangunan manusia. Artinya, IPM

hanya memberikan gambaran umum mengenai kemajuan sosial dan ekonomi, bukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh aspek pembangunan. Namun demikian, keberadaan IPM tetap menjadi langkah maju dibandingkan indikator sebelumnya yang hanya berfokus pada pendapatan ekonomi semata. Nilai IPM yang tinggi atau rendah dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah. Meskipun demikian, peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara cepat. Pembangunan manusia merupakan proses jangka panjang yang hasilnya baru terlihat setelah beberapa waktu. Hal ini berbeda dengan pembangunan ekonomi, di mana hasilnya dapat diamati lebih segera. Sementara itu, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan memerlukan waktu lebih lama karena berkaitan dengan perubahan kualitas manusia secara menyeluruh.



Sumber: BPS Provinsi 2024

Gambar 2 Diagram IPM di Pulau Jawa 2024

Berdasarkan gambar 2 grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2024, diketahui adanya perbedaan tingkat pembangunan manusia di antara setiap provinsi. DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi dengan nilai 84,15 dan berada dalam kategori sangat tinggi, diikuti oleh DI Yogyakarta dengan IPM sebesar 81,62. Kedua provinsi tersebut mencerminkan wilayah yang memiliki akses

yang relatif baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sementara itu, Jawa Barat dengan IPM 74,92, Jawa Tengah dengan IPM 73,87, serta Banten dengan IPM 76,35 berada dalam kategori IPM tinggi. Jawa Timur memiliki IPM sebesar 75,35 yang juga berada dalam kategori tinggi, meskipun masih tertinggal dibandingkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar dan kontribusi ekonomi yang signifikan, kualitas pembangunan manusianya belum optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Pulau Jawa secara keseluruhan relatif maju, pembangunan manusia di antar provinsi belum merata, terutama di daerah dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang luas.

Tabel 1 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur

Tahun	Nilai IPM
2020	73,04
2021	73,48
2022	74,05
2023	74,65
2024	75,35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Berdasarkan tabel 1 pembangunan manusia di Jawa Timur terus memperlihatkan kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Sejak awal tahun 2020, status pembangunan manusia di wilayah ini telah masuk dalam kategori "tinggi". Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, rata-rata peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 0,78 persen setiap tahunnya, yaitu meningkat dari 73,04 pada tahun 2020 hingga menjadi 75,35 pada tahun 2024. Lonjakan ini menunjukkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik setelah terdampak oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2024,

angka IPM yang mencapai 75,35 masih menempatkan Jawa Timur dalam kategori "tinggi", mencerminkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Penurunan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 tidak bisa dipisahkan dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Pandemi ini menimbulkan gangguan besar pada aktivitas ekonomi, sektor kerja, serta layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kebijakan pembatasan sosial yang besar-besaran dan berkurangnya mobilitas masyarakat mengakibatkan banyak sektor usaha tertekan, sehingga meningkatkan angka pengangguran, mengurangi pendapatan keluarga, dan mengganggu proses belajar mengajar secara langsung.

Tabel 2 Data Kumulatif Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Timur

No	Indikator	Jumlah Kasus (Orang)
1	Kasus Terkonfirmasi	648.240
2	Kasus Sembuh	614.323
3	Kasus Meninggal	32.508

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Dashboard Pemantauan Covid-19 Provinsi Jawa Timur), update 21 Juni 2023.

Berdasarkan tabel 2, hingga 21 juni 2023, jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi Covid 19 di provinsi Jawa Timur mencapai 684.240 kasus, dengan 614.323 kasus sembuh dan 32.508 kasus meninggal dunia. Data tersebut menyatakan bahwa pandemi Covid 19 memberikan dampak Kesehatan yang serius dan luas di Jawa Timur. Tingginya jumlah kasus ini berdampak pada sektor

terutama ekonomi, ketenagakerjaan, serta pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang memengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 3 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Pacitan	69.48	69.49	70.1	70.94	71.48
Ponorogo	71.57	71.81	72.59	73.18	73.7
Trenggalek	70.1	70.8	71.6	71.96	72.47
Tulungagung	73.85	73.98	74.74	74.9	75.23
Blitar	70.83	71.41	71.86	72.46	72.94
Kediri	72.6	73.51	74.2	74.66	75.19
Malang	71.24	71.48	72.23	73	73.73
Lumajang	67.04	67.91	69.4	69.97	70.13
Jember	68.96	69.4	69.83	70.42	70.92
Banyuwangi	71.85	72.62	73.15	73.79	74.3
Bondowoso	69.1	69.91	70.56	71.06	71.27
Situbondo	68.94	69.34	69.76	70.55	71.22
Probolinggo	66.97	68.54	69.06	70.08	70.69
Pasuruan	70.61	70.98	71.46	71.91	72.39
Sidoarjo	80.68	81.01	81.17	81.88	82.59
Mojokerto	74.58	74.9	75.91	76.23	76.59
Jombang	76.83	74.1	74.66	75.18	75.67
Nganjuk	71.88	72.2	73.01	73.61	74.24
Madiun	70.3	71.07	71.8	72.02	72.32
Magetan	74.58	74.96	75.76	76.3	76.77
Ngawi	71.49	71.97	72.63	73.28	73.91
Bojonegoro	71.59	71.91	72.3	72.74	73.31
Tuban	69.6	70.1	70.7	71.4	72.11
Lamongan	73.44	73.97	74.97	75.29	75.3
Gresik	79.06	79.28	77.42	78.44	78.53
Bangkalan	64.88	65.42	65.95	66.66	67.13
Sampang	64.24	65.44	65.99	66.19	66.72
Pamekasan	68.55	68.78	69.38	70.32	70.85

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sumenep	67.15	67.74	68.49	69.13	69.78
Kota Kediri	79.76	79.76	80.17	80.67	81.88
Kota Blitar	78.98	79.06	79.57	80.07	80.84
Kota Malang	83.08	83.77	83.93	84.09	84.54
Kota Probolinggo	76.81	77.2	77.5	77.69	77.79
Kota Pasuruan	77.47	78.03	77.71	78.1	78.5
Kota Mojokerto	79.05	79.88	80.19	80.9	81.76
Kota Madiun	80.94	81.37	81.95	82.71	83.31
Kota Surabaya	82.31	82.94	83.41	84	84.69
Kota Batu	76.82	77.21	78.13	79.07	79.59
Jawa Timur	73.04	73.48	74.05	74.65	75.35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Pada tabel 3 diketahui seluruh daerah di Jawa Timur menunjukkan kemajuan IPM pada periode 2020 hingga 2024. Contoh nyata adalah Kabupaten Lumajang yang berhasil naik peringkat dari kategori "sedang" ke "tinggi", menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat di area tersebut. Distribusi pencapaian pembangunan manusia menunjukkan tren yang lebih positif. Pada tahun 2024, ada 28 daerah yang terklasifikasi dalam kategori "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan 3 daerah masuk dalam kategori "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan tidak ada wilayah yang lagi dalam kategori "rendah". Ini menunjukkan bahwa usaha untuk meratakan pembangunan di Jawa Timur mulai menunjukkan hasil yang positif.

Tantangan dalam pembangunan manusia masih terlihat dari adanya perbedaan pencapaian antar wilayah. Beberapa kota besar seperti Surabaya, Malang, Madiun, Sidoarjo, Kediri, Mojokerto, dan Blitar telah mencapai status "sangat tinggi" ($\text{IPM} \geq 80$), yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain yang masih dalam kategori

"tinggi" atau "sedang". Situasi ini menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Jawa Timur masih terfokus pada wilayah perkotaan dan area yang mendukung perekonomian, sementara sebagian daerah lain masih membutuhkan peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi ketidakseimbangan ini juga berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini terjadi karena daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik pada kesempatan kerja dan keterampilan yang sesuai. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pasar tenaga kerja menjadi lebih maksimal dibandingkan dengan wilayah yang masih berada di belakang (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa banyak individu yang berada dalam usia kerja berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk mereka yang sudah bekerja dan yang sedang berusaha mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran tentang sejauh mana potensi sumber daya manusia dimanfaatkan dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kenaikan TPAK sangat penting karena menunjukkan adanya peningkatan mobilisasi tenaga kerja dengan semakin banyak individu yang berpartisipasi aktif di pasar kerja, ada potensi yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Semua elemen ini secara keseluruhan dapat memperkuat kapasitas pembangunan manusia dan mendorong kemajuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur dengan catatan bahwa kualitas pekerjaan dan distribusi peluang harus sebanding dan merata di seluruh daerah (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025).

Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin banyak individu pada usia kerja yang memberikan kontribusi dalam aktivitas ekonomi, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan, memperkuat kemampuan membeli, serta mempengaruhi standar hidup masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan yang luas dari angkatan kerja juga mencerminkan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan peluang nyata bagi masyarakat untuk berperan sebagai pelaku dalam pembangunan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Assa Faelassuffa (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya tingkat partisipasi angkatan kerja. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Arah pengaruhnya dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada kondisi sosial ekonomi di masing-masing daerah. Faktor lain yang turut berperan adalah tingkat produktivitas tenaga kerja. Ketika produktivitas meningkat, nilai kompetitif tenaga kerja juga ikut naik. Namun, kondisi ini dapat mendorong perusahaan beralih pada penggunaan teknologi untuk menekan biaya produksi.

Berdasarkan tabel 4 diketahui penduduk yang berada dalam kategori angkatan kerja di Jawa Timur bulan Agustus 2024 sebanyak 33,19 juta orang, mengalami kenaikan sekitar 297,96 ribu orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2023. Dari seluruh jumlah penduduk usia kerja tersebut, sekitar 24,38 juta orang atau 73,45 persen digolongkan sebagai tenaga kerja, sementara sisanya berada di

dalam kategori bukan tenaga kerja BPS Provinsi Jawa Timur (2024). Berdasarkan data total tenaga kerja, sebanyak 23,36 juta orang merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 1,02 juta orang dalam kondisi menganggur. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 513 ribu orang, yang terdiri dari penambahan penduduk yang bekerja sebanyak 657,93 ribu orang dan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 144,94 ribu orang.

Tabel 4 Data penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023 - Agustus 2024(%)

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024
Penduduk Usia Kerja	32,90	33,19
Angkatan Kerja	23,87	24,38
Bekerja	22,70	23,36
Pengangguran	1,17	1,02
Bukan Angkatan Kerja	9,03	8,81

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2025

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dalam kegiatan ekonomi sebesar 86,52 % lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan sebesar 60,64 %. Hal ini juga tercermin dalam persentase populasi yang bekerja, di mana angka laki-laki mencatat 82,66%, sedangkan perempuan hanya mencatat 58,33%. Meskipun begitu, rasio pengangguran laki-laki (3,86%) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran perempuan (2,31%), yang menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang aktif mencari pekerjaan. Di sisi lain, perempuan mendominasi kategori bukan angkatan kerja dengan persentase 39,36%, jauh lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 13,49 %. Sebagian besar perempuan dalam kategori

ini menghabiskan waktu mereka untuk kegiatan rumah tangga, mencapai 29,69%, sementara laki-laki hanya 3,19%. Kegiatan sekolah menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih terlibat dalam pasar kerja, sedangkan perempuan cenderung lebih banyak menjalankan peran di ranah domestik.

Tabel 5 Data Persentase Penduduk Usia Kerja di Jawa Timur Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2023 dan 2024

Kegiatan Utama	2024	
	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
Angkatan Kerja	86,52	60,64
Bekerja	82,66	58,33
Pengangguran	3,86	2,31
Bukan Angkatan Kerja	13,49	39,36
Sekolah	6,52	6,85
Mengurus Rumah Tangga	3,19	29,69
Lainnya	3,78	2,82
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Isu-isu terkait produktivitas serta kualitas tenaga kerja berpotensi untuk mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Penurunan jumlah pekerja yang bekerja penuh waktu dan meningkatnya setengah penganggur menunjukkan bahwa sebagian warga usia kerja belum terintegrasi dengan baik dalam pasar kerja. Situasi ini dapat menyebabkan kenaikan TPT akibat banyaknya tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Selain itu, jumlah pekerja keluarga atau yang tidak mendapatkan bayaran yang tinggi juga mencerminkan kurangnya efisiensi dan daya saing dari tenaga kerja, sehingga berdampak pada

rendahnya pendapatan serta produktivitas Masyarakat (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025).

Keberadaan pekerja dengan pendidikan yang rendah semakin memperbesar tantangan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat pendidikan adalah elemen krusial dalam memperluas peluang pekerjaan serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut bisa menghambat laju kenaikan IPM, khususnya dalam aspek pendapatan dan pendidikan, yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Dengan demikian, peningkatan produktivitas, mutu pendidikan, dan distribusi kesempatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam menekan angka pengangguran terbuka serta mendorong perbaikan IPM di provinsi ini.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini menghitung persentase penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja namun, belum mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan keseluruhan Angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa, meskipun ekonomi mengalami pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja masih belum mencapai Tingkat yang optimal. Oleh karena itu, TPT menjadi faktor utama dalam penilaian kebijakan pengembangan ketenagakerjaan, karena mencerminkan sejauh mana ekonomi suatu daerah bisa memfasilitasi tenaga kerja yang tersedia (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025)

Apabila TPT berada pada angka yang tinggi, itu bisa menjadi tanda bahwa pertumbuhan ekonomi belum bersifat terbuka, berarti pertumbuhan tersebut belum

mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi semua kelompok penduduk yang berusia bekerja. Situasi ini juga dapat menunjukkan bahwa struktur ekonomi belum mengalami perubahan signifikan atau ada hambatan dalam penyesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan. Hal ini bisa menyebabkan TPT yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan penyerapan tenaga kerja, yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup layak.

Menurut Junnatin Wardiah (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar perubahan dalam indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh keadaan kerja di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia, dan pada saat kualitas hidup masyarakat membaik, angka pengangguran cenderung menurun sehingga berdampak kurang positif bagi hasil pembangunan manusia. Oleh karena itu, berbagai strategi diperlukan untuk meningkatkan hasil pembangunan manusia, terutama melalui pengurangan angka pengangguran sehingga kemajuan kesejahteraan masyarakat dapat terus berkembang dan mendorong perbaikan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Pada tabel 6 diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur tercatat pada angka 4,19 persen. Data ini menunjukkan bahwa dari seratus orang dalam angkatan kerja, sekitar empat sampai lima orang tidak memiliki pekerjaan. Penganggur yang dimaksud meliputi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya, serta mereka yang menghentikan pencarian pekerjaan akibat merasa putus asa

terhadap peluang yang tersedia. Ketika dibandingkan dengan Agustus 2023, TPT menunjukkan penurunan sebesar 0,69 persen poin, yang menandakan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur. Penurunan ini mungkin mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal, serta adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi setelah pemulihan berbagai sektor usaha. Meskipun begitu, tingkat pengangguran yang masih ada tetap menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan, terutama untuk kelompok usia muda dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah yang rentan terhadap pengangguran.

Tabel 6 Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur 2023-2024

Indikator	Agustus 2023 (%)	Agustus 2024 (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,88	4,19
Perkotaan	5,58	4,49
Perdesaan	4,01	3,78
Laki-laki	4,94	4,46
Perempuan	4,80	3,80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,56	73,45
Laki-laki	85,90	86,52
Perempuan	59,46	60,64

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Pada tabel 7 diketahui Lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatat TPT paling tinggi yaitu 6,81 %, diikuti oleh lulusan SMA yang mencapai 6,69 %, sedangkan lulusan perguruan tinggi (DIV/S1/S2/S3) mencatat TPT sebesar 5,33 %. Namun demikian, TPT untuk lulusan SMK mengalami penurunan yang

paling besar jika dibandingkan dengan pendidikan lainnya, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja dari kelompok ini. Di sisi lain, TPT bagi lulusan perguruan tinggi justru menunjukkan kenaikan, yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kemampuan lulusan dan permintaan di pasar kerja. Sementara itu, penduduk yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih mencatat TPT terendah, yaitu kisaran 1–2%, karena sebagian besar dari mereka terlibat dalam sektor informal atau pekerjaan dengan intensitas rendah (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi sangat terkait dengan perkembangan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Jawa Timur. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan permintaan di pasar kerja menyebabkan banyak lulusan yang terdidik belum mampu terserap dengan baik, sehingga potensi produktivitas daerah tidak dapat dimaksimalkan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Tabel 7 Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)

Pendidikan	Agustus 2023	Agustus 2024
SD ke bawah	2,24	1,92
SMP	4,87	4,10
SMA	7,93	6,69
SMK	8,70	6,81
Diploma I/II/III	4,64	4,27
Universitas	5,04	5,33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Berdasarkan tabel 8 diketahui kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Timur tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Meskipun terdapat sedikit perlambatan, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,93% menunjukkan daya saing dan kekuatan mendasar ekonomi daerah yang tetap terjaga. Selanjutnya perspektif sektor usaha, hampir semua bidang ekonomi di Jawa Timur mencatat pertumbuhan positif di sepanjang tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor tetap berjalan dengan stabil. Pada sektor Jasa Lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 8,58%. Selain itu, Jasa Perusahaan mencatat pertumbuhan sebesar 7,88%, menandakan adanya peningkatan kebutuhan akan jasa profesional seperti konsultasi, layanan keuangan, dan teknologi informasi. Satu-satunya sektor yang mengalami penurunan adalah Pertambangan dan Penggalan.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	1,91	1,75	1,87	2,26	0,07
2	Pertambangan dan Penggalan/ Mining and Quarrying	-3,52	-4,48	-6,98	1,65	-0,63
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	-2,08	3,38	6,24	4,11	5,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	-2,39	5,82	7,51	24,23	5,92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	5,03	5,67	2,26	2,92	2,44
6	Konstruksi/ Construction	-3,28	2,53	6,3	5,06	6,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-5,78	7,77	6,88	5,76	4,54

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
8	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	-10,33	2,51	19,49	13,29	9,5
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-8,85	3,06	9,34	8,05	6,98
10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	9,83	6,89	4,54	6,6	6,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,18	1,61	2,33	3,81	3,91
12	Real Estat/ Real Estate Activities	3,95	2,29	4,55	2,69	2,91
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	-7,22	2,35	5,18	8,27	7,88
14	M. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-0,39	0,29	0,26	0,04	7,78
15	N. Jasa Pendidikan/ Education	3,96	0,93	0,85	4,84	4,82
16	O. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	8,53	4,97	2,36	3,82	5,52
17	P. Jasa lainnya/ Other Services	-13,8	5,78	12,44	9,25	8,58
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	-2,33	3,56	5,34	4,95	4,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2025

Hasil penelitian Cahyanti *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur namun, jika diteliti secara parsial, hasil yang diperoleh berbeda. Pertumbuhan ekonomi terbukti memberikan dampak negatif terhadap IPM, Di sisi lain, TPAK tidak berkontribusi pada IPM disebabkan oleh kurangnya produktivitas angkatan kerja akibat banyaknya pendatang serta predominasi lulusan dari pendidikan menengah ke bawah. Sementara itu, TPT memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap IPM,

menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berdampak langsung pada penurunan daya beli, kesehatan, dan akses pendidikan masyarakat. Hal ini semakin diperkuat oleh posisi IPM Jawa Timur yang berada pada tingkat lebih rendah ketimbang provinsi lainnya di Pulau Jawa, sehingga mengisyaratkan adanya kesenjangan antara capaian pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia.

Penelitian Susilowati & Adianita (2023) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti *et al.*, (2021), terutama dalam menjelaskan dampak negatif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM. Ini menunjukkan bahwa tingginya angka pengangguran berpengaruh langsung pada penurunan kesejahteraan masyarakat, kemampuan belanja, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif terhadap IPM, yang menandakan adanya variasi dalam karakteristik daerah, struktur ekonomi, serta efektivitas penggunaan hasil pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, perbedaan ini menegaskan bahwa dampak dari variabel ekonomi terhadap IPM sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan yang diterapkan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam yang fokus pada penyebaran pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan untuk memastikan kontribusi maksimal dari pertumbuhan ekonomi dan partisipasi angkatan kerja terhadap peningkatan IPM di Jawa Timur.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi serta mampu

menciptakan pendapatan. Situasi ini dapat memicu peningkatan produktivitas dan memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, kualitas hidup masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Berita Resmi Statistik, 2024).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi seringkali menunjukkan bahwa kesempatan kerja belum cukup untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada. Pengangguran dapat menghalangi kesejahteraan karena warga kehilangan sumber pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, semakin tinggi TPT, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan pada pencapaian (Berita Resmi Statistik, 2024).

Pertumbuhan ekonomi juga memainkan peranan penting dalam memperkuat pembangunan manusia. Saat ekonomi suatu wilayah tumbuh, pendapatan daerah meningkat, sehingga pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik untuk meningkatkan layanan publik, menciptakan pekerjaan, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian IPM yang lebih baik (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka disusun penelitian berjudul **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

3. Mengetahui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
4. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Hal ini dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah dalam bidang ekonomi Pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan Masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun kebijakan pembangunan wilayah, yang meliputi upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan angkatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai referensi dan pengembangan ilmu di bidang ekonomi pembangunan dan ketenagakerjaan. Selain menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami hubungan variabel ekonomi makro dan pembangunan manusia, penelitian ini juga dapat menjadi contoh penelitian empiris yang relevan dengan kondisi daerah serta memperkaya repositori ilmiah universitas.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji lebih lanjut dampak dari kondisi ekonomi dan pekerjaan terhadap perkembangan manusia baik di tingkat regional maupun nasional.

